

Pemkab Sleman - Pemkot Yogya Sepakat Kendalikan Inflasi Daerah

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman dan Pemkot Yogya sepakat untuk mengendalikan inflasi daerah. Kesepakatan itu dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan Bupati Sleman Kustini dan Pj Walikota Yogya Sumadi di Pendapa Parasamya Setda Sleman, Rabu 14/12).

Menurut Bupati Kustini, sampai saat ini stok hasil pertanian dari Sleman cukup banyak, khususnya komoditas cabai. Selain itu harga hasil pertanian di Sleman relatif lebih rendah dibanding di Kota Yogya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama kedua daerah untuk saling mencukupi kebutuhan pasokan dengan tujuan akhir mengendalikan inflasi daerah. "Khususnya

untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) di mana biasanya harga komoditas melambung," jelasnya.

Sementara Pj Walikota Sumadi mengaku bangga bisa bekerjasama dengan Pemkab Sleman untuk memasok komoditas pertanian.

Mengingat sampai saat ini, tiga pasar di Kota Yogya selalu menjadi acuan BPS untuk menen-



KR-Hasto Sutadi

Bupati Kustini dan Pj Walikota Sumadi menandatangani kesepakatan bersama pengendalian inflasi daerah.

tukan laju inflasi. Padahal Kota Yogya tidak memiliki sumber daya pertanian, sehingga harga komoditas di Kota relatif tinggi. "Untuk itulah, kami bekerjasama dengan Sleman untuk mendapatkan pasokan komoditas pertani-

an sehingga inflasi bisa dikendalikan," ujarnya.

Terkait itu pula, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sleman bersama TPID DIY melakukan pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Sleman, tepat-

nya di Pasar Prambanan dan Lotte Mart, Rabu (14/12). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kondisi harga bahan pangan po-

kok menjelang Nataru.

"Secara garis besar, komoditas tersedia sampai Natal dan Tahun Baru. Jadi masyarakat jangan terlalu panik, karena

ketersediaan bahan baku sudah tercukupi," terang Yuna Pancawati, Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekda DIY. (Has)-f



Penguatan TPK Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan

Danang Maharsa SE



TELAH diatur oleh Pemerintah Pusat bahwa semua provinsi dan semua kabupaten/kota wajib membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Aturan tersebut telah lama diterbitkan dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan. Aturan terbaru adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2020.

Ketika pertama kali aturan tersebut, Pemkab Sleman termasuk kabupaten yang paling awal membentuk TKPKD, yang saat itu bernama Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Selanjutnya Pemkab Sleman mengambil kebijakan lebih jauh, yaitu membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kapanewon (TPK Kapanewon), Tim Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TPK Kalurahan), dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Padukuhan (TPK Padukuhan).

Pertimbangan utama pembentukan itu adalah kesadaran bahwa TKPK Kabupaten tidak bisa mengetahui keadaan riil warga miskin sehingga sangat mungkin kebijakannya tidak tepat. Di samping itu, ketugasan TKPK Kabupaten lebih bersifat koordinatif, bukan operasional.

Dengan dibentuk TPK Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan diharapkan bisa diketahui secara faktual dan rinci mengenai kondisi warga miskin beserta perkembangan kehidupannya dari hari ke hari. Oleh karena itu diputuskan bahwa ketugasan masing-masing TPK diatur sedemikian rupa sehingga tidak tumpang-tindih.

Tugas utama TPK Padukuhan adalah *ngawat-awati lan ngopeni* warga miskin. Yang dimaksud *ngawat-awati* adalah memantau kondisi warga/keluarga miskin tersebut apakah sudah mendapatkan bantuan, apakah pernah mendapat pelatihan, apakah pernah mendapat pinjaman modal usaha, bagaimana perkembangan usahanya, dan seterusnya.

Yang dimaksud *ngopeni* adalah melakukan advokasi. Jika warga/keluarga miskin tersebut berhak mendapat bantuan tertentu tetapi ternyata belum memperoleh, maka TPK Padukuhan membantu menguruskan sehingga warga/keluarga miskin

tersebut mendapatkan haknya. Tugas utama TPK Kalurahan adalah mengkoordinasikan pemberdayaan warga/keluarga miskin. Dalam setiap kalurahan tentu terdapat Pendamping PKH, penggerak PKK, Tenaga Pendamping Kalurahan, pendamping UPPKS, (bekas) pendamping PNP, dan sejenisnya. Pada umumnya mereka selama ini bekerja hanya mengikuti pedoman masing-masing; belum saling bersinergi. Dampaknya, sangat mungkin terjadi penumpukan sasaran, redundancy kegiatan, dan duplikasi bantuan.

Di sinilah tugas TPK Kalurahan untuk mengkoordinasikan dan membuka jalan untuk saling bersinergi. TPK Kalurahan dapat mengundang rapat koordinasi semua pendamping dan meminta mereka untuk saling bertukar data tentang penerima manfaat, bertukar informasi tentang ragam kegiatan yang sedang dan akan dikerjakan, dan bertukar informasi tentang alokasi anggaran yang tersedia. Dari situ kemudian bisa dirancang sinergi agar upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Tugas utama TPK Kapanewon adalah mensinkronkan metode kerja penanggulangan kemiskinan. Tugas sinkronisasi merode kerja ini dilakukan baik antarkalurahan maupun antara kalurahan dengan dinas, Lembaga, LSM, dan kalangan sawasta. Sinkronisasi metode kerja diperlukan untuk mencapai efektivitas kegiatan.

Misalnya warga miskin di sebuah kapanewon kebanyakan bekerja sebagai buruh tani. Misalnya hendak diberikan pelatihan, TPK Kapanewon dapat memberi rekomendasi mengenai bentuk, jenis dan metode pelatihan yang tepat.

Di luar tugas sebagaimana diuraikan di atas, ada kewajiban TPK Kapanewon untuk secara rutin *ngaruhke* TPK Kalurahan. Pada gilirannya, TPK Kalurahan *ngaruhke* TPK Padukuhan. Apabila semua dapat melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, saya yakin kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat segera berkurang. Apabila ternyata belum bisa melaksanakan, itu artinya tiba saatnya untuk berikan penguatan kapasitas. (Has)-f

BANK BANTUL UNDI TABUNGAN DAN KREDIT

Tri Wahyuningsih dan Dwi Fitriani Raih Mobil Ayla



KR-Judiman

Secara simbolis Bupati Bantul menyerahkan hadiah utama mobil Ayla.

BANTUL (KR) - PT BPR Bank Bantul (Per-seroda) menggelar Undian Tabungan Periode XVII dan Kredit Periode XIX. Undian yang digelar di Aula PT BPR Bank Ban-

tul, Rabu (14/12), disaksikan Notaris Visia Wahyuni Pujiastuti, petugas dari Dinas Sosial, Forkom-pingkat Bantul dan tamu undangan.

Pengundian dilakukan

oleh Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, hadiah utama mobil Ayla diraih nasabah Tri Wahyuningsih warga Gayam Gumuk. Sedangkan pemenang undian kredit dengan hadiah utama sepeda motor dime-nangkan Linanda Christani warga Kadipiro Asri Karanganyar. Pemenang undian tabungan berhadiah mobil Ayla diraih Dwi Fitriani warga Demangan Gadingsari Sanden Bantul.

Bupati mengemukakan, Bank Bantul milik masyarakat yang saat ini memiliki jumlah nasabah sekitar 68.000 orang. Dengan semakin sering menabung, akan semakin besar pula Bank Bantul, sekaligus perbankan daerah ju-

ga akan semakin kuat.

"Karena itu saya mengajak semua nasabah untuk terus menabung di Bank Bantul, sebagai upaya gotong royong memajukan perekonomian daerah. Berapapun dana yang ditabung, saya yakin akan memberikan multiflier effect bagi pergerakan ekonomi dan pembangunan di Bantul," papar Bupati.

Sementara Dirut Bank Bantul, Heriska Afriani SSos, menjelaskan pengundian hadiah periode kali ini, tabungan yang diikuti sertakan dari rekening tabungan Tamansari, Simpel dan Adik. Sedangkan untuk pengundian kredit dari rekening kredit pegawai dan UMKM terdiri kredit Peseban dan Projo. (Jdm)-f

APRESIASI ATAS KEPEDULIAN DAN SUMBANGSIH PERUSAHAAN

Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Sleman 2022



KR-Istimewa

Kepala Bappeda Dwi Anta Sudibya

BUPATI Sleman Kustini menyerahkan penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) tahun 2022 di The Rich Jogja Hotel, Rabu (14/12). Setidaknya ada 40 perusahaan di Sleman mendapat penghargaan yang diserahkan Bupati didampingi Kepala Bappeda Sleman Dwi Anta Sudibya dan Ketua Forum TJSP Sleman Dwi Nurwata.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas realisasi TJSP tahun 2022. Penghargaan TJSP tahun 2022 tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemkab Sleman atas kepedulian dan peran serta perusahaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.

"Saya atas nama pribadi maupun Pemkab Sleman mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi bapak ibu semua. Saya harapkan pemberian penghargaan ini ke depannya dapat semakin meningkatkan partisipasi aktif perusahaan dalam TJSP di Kabupaten Sleman," ujar Bupati.

Peningkatan jumlah anggaran TJSP pada tahun ini, dinilai Bupati sebagai indikasi meningkatnya kepedulian perusahaan-perusahaan terhadap kegiatan pembangunan di Sleman. Untuk itu, Bupati berharap agar ke de-

pan sinergi antara Pemkab Sleman dengan perusahaan-perusahaan semakin meningkat.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Sleman selaku Pengarah Sekretariat Forum TJSP Sleman Dwi Anta Sudibyo mengungkapkan, pelaksanaan TJSP di Kabupaten Sleman merupakan tindak lanjut dari telah ditetapkannya Perda No 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Sebagai pedoman pengelolaan Forum TJSP telah diterbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan diatas diharapkan dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP serta mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

"Pemberian piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepedulian, peran serta dan sumbangsih perusahaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Sehingga ke depannya dapat meningkatkan partisipasi aktif perusahaan dalam melaksanakan

kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Sleman," ujarnya.

Realisasi Meningkat

Menurut Sudibya, jumlah realisasi anggaran TJSP perusahaan tahun 2022 dari 67 perusahaan adalah Rp 12.322.257.773 dengan jumlah total 590 kegiatan dengan rincian kategori sebagai berikut: Untuk program pemberdayaan sosial Rp 4.730.203.894 (38,39% dari total anggaran dengan 426 kegiatan), untuk program pemberdayaan ekonomi Rp 1.685.867.175 (13,68% dari total anggaran dengan 80 kegiatan), dan untuk program pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan Rp 5.906.186.704,- (47,93% dari total anggaran dengan 94 kegiatan).

"Realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 realisasi TJSP mencapai Rp 10.164.910.139 yang dilaksanakan oleh 45 perusahaan dengan 201 kegiatan. Tahun 2020 total realisasi TJSP hanya mencapai Rp 7.173.642.216 dengan 22 perusahaan pelaksana dan 191 kegiatan. Pada tahun

2019 jumlah total anggaran mencapai Rp 6.786.268.480 dengan 24 perusahaan pelaksana dan 151 kegiatan," bebernya.

Di tahun 2023, akan dilaksanakan TJSP Award yang merupakan ajang pemberian penghargaan TJSP tertinggi yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk mendapatkan TJSP Award, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan, salah satunya keaktifan perusahaan dalam melaporkan program TJSP-nya. Untuk itu kami mengimbau agar perusahaan dapat melaporkan program TJSP nya secara berkala dan tepat waktu.

Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan, semua perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman wajib menjadi anggota Forum TJSP. Sampai tahun 2022 terdapat 137 perusahaan yang terdaftar menjadi anggota Forum TJSP. Akan tetapi, di tahun 2022 ini baru 67 perusahaan atau baru 49% yang melaporkan program TJSP nya.

Kunjungi Perusahaan

Sementara Ketua Forum TJSP Sleman Dwi Nurwata

memaparkan, Forum TJSP didirikan sejak tahun 201, dan di tahun 2021 dilakukan perubahan pengurus Forum TJSP dimana pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 46.5/Kep.KD/H/A/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Periode 2021-2023. Forum TJSP beranggotakan perusahaan perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman.

"Sejak dilantik, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan semangat dan partisipasi perusahaan. Di antaranya kunjungan rutin ke perusahaan-perusahaan oleh Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara dan beberapa pengurus Forum, dengan didampingi sekretariat Forum TJSP," ungkapnya.

Pelaksanaan Gebyar TJSP Merdeka 2022 dalam rangka memeriahkan HUT RI di bulan Agustus lalu, yang mampu merangkul 21 perusahaan dan menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 612 juta. Penentuan program prioritas bersama, dengan



KR-Istimewa

Ketua Forum TJSP Dwi Nurwata.

memilih lokasi dan program pengembangan ekonomi, sosial, infrastruktur dan lingkungan di lokus tertentu, agar menjadi contoh dan bukti kekuatan sinergitas bersama yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Sleman.

Menurut Dwi, tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun yang berat bagi perusahaan dikarenakan banyak perusahaan yang masih merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, bahkan menghentikan operasionalnya. Walaupun begitu, ternyata perusahaan yang ada di Sleman masih komit untuk membantu sekitar dan sesama. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah realisasi TJSP yang disalurkan di tahun 2021 dan 2022.

"Koordinator Wilayah Forum TJSP telah mengunjungi perusahaan-perusahaan dan melihat kondisi terkini serta menginventarisir perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSP-nya di Kabupaten Sleman. Di tahun 2022 ini ada 67 perusahaan yang telah melaporkan kegiatan TJSP-nya dan menerima piagam penghargaan dari Bupati Sleman," jelasnya.

Dikatakan pula, jumlah realisasi anggaran TJSP perusahaan dari tahun ke

tahun sebagai berikut Tahun 2019 jumlah total anggaran mencapai Rp 6.786.268.480 dengan 24 perusahaan pelaksana dan 151 kegiatan, Tahun 2020 total realisasi TJSP hanya mencapai Rp 7.173.642.216 dengan 22 perusahaan pelaksana dan 191 kegiatan, Tahun 2021 realisasi TJSP mencapai Rp 10.164.910.139 yang dilaksanakan oleh 45 perusahaan dengan 201 kegiatan, tahun 2022 dari 67 perusahaan adalah Rp 12.322.257.773 dengan jumlah total 590 kegiatan.

"Rata-rata peningkatan realisasi anggaran TJSP mencapai 23%, hal ini merupakan hal yang sangat mengembirakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman semakin kuat dan berkembang, serta mampu memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat di Kabupaten Sleman. Kami mengajak perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman yang belum bergabung menjadi anggota Forum TJSP agar dapat segera bergabung, dan yang sudah bergabung, mari kita bersama-sama membantu pengentasan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada di sekitar kita," tandas Dwi. (Has)-f



KR-Istimewa

Bupati Kustini didampingi Dwi Anta Sudibya dan Dwi Nurwata menyerahkan penghargaan kepada salah satu perwakilan perusahaan.